



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK TAHUN 2024

**KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Sutoyo Indah
Jl. Mayor Jendral Sutoyo
Pontianak - 78121
Telp. (0561) 732806

Jl. Mayor Jendral Sutoyo, Komp. Sutoyo Indah
Telp. (0561) 732806

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pontianak telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- Kesabngpol) Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Atas dasar ini RENJA-KESBANGPOL Tahun 2024 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut, dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RENSTRA-KESBANGPOL Tahun 2024-2026 dan RPJMD Kota Pontianak 2024-2026.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK.....	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	33
3.3. Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BNAGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK	51
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Uraian	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pontianak.....	9
Tabel 2.2. Target Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 2026.....	16
Tabel 2.3. Review Terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota PontianakTahun 2023.....	21
Tabel 2.4. Usualan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	28
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2024-2026.....	35
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024	37
Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-BAKESBANGPOL) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunannya terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Kesbangpol) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2024-2026, karena Renja Perangkat Daerah menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tersebut ke dalam rencana program/kegiatan dan penganggaran tahunan. Kedua dokumen perencanaan strategis jangka menengah tersebut adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dokumen perencanaan strategis teknis dimaksud mengacu atau berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan RENJA-BAKESBANGPOL Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini berpedoman pada RPD Kota Pontianak 2024-2026. Dengan

demikian, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-BAKESBANGPOL) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang disusun ini diharapkan dapat mewujudkan pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 139).

25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 24).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis ... Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
30. (tambahkan regulasi yang terkait khusus urusan penyelenggaraan pemerintahan. tata urutan perundang-undangan disesuaikan)

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung tercapainya indikator sasaran maka dilakukan perhitungan detail dari anggaran yang tercantum dalam RKPD dengan memperhatikan analisa kebutuhan.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sangat berpengaruh pada kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Perubahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menganggarkan sebesar Rp. 28.651.899.620,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 25 Kegiatan.

Anggaran sebesar Rp. 28.651.899.620,- tersebut dipergunakan untuk membiayai program rutin (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota) sebesar Rp. 3.625.058.520,- sedangkan untuk program prioritas sebesar Rp. 25.026.841.100,-. Dengan capaian sebesar Rp. 1.706.816.088,- atau sebesar 6% pada Tri Wulan ke 2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2023, penyebab anggaran yang terserap sangat sedikit dikarenakan terjadi kesalahan penginputan rekening pada sub kegiatan dana bansos organisasi kemasyarakatan sehingga hanya bisa di serap ketika perubahan anggaran. Kegiatan Paskibraka yang belum selesai dikarenakan kegiatan dimulai dari bulan Januari hingga Agustus.

Adapun selanjutnya hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 jika dikaitkan dengan target pencapaian target Perubahan Renstra Bakesbanpol Kota Pontianak Tahun 2024-2026, maka rekapitulasi tersebut dapat dilihat di tabel 2.1 berikut:

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis s/d Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)
								I	II			

Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang masih belum terisi dikarenakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 merupakan tahun pertama pada periodesasi Rencana Strategis 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Perubahan Kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2022-2024 yang disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024.

Berpedoman pada RPJMD Kota Pontianak 2020-2024, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visinya, yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan bermartabat”** serta Misi ke- 5 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, yaitu **“Mewujudkan Kota Yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan”** sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

No	Indikator	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kota Toleran	-	-	-	4.85	5	-	-	-	4.85	5

Berdasarkan Tabel 2.2. tersebut diatas, maka Analisis Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2020-2024 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2023.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Bupati/Walikota dibantu oleh instansi vertikal. Pada Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan umum yang terdiri dari :

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hal asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat baik dalam bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di Kota Pontianak merupakan urusan wajib dan menjadi urusan pemerintahan umum, dan inilah salah satu isi strategis terkait tupoksi Badan Kesbangpol baik sebagai instansi vertikal maupun SKPD.

a. Analisis Tingkat Kinerja

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dari tahun 2024 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu :

- Belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
- Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya implementasi regulasi sistem perencanaan.
- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- Belum terpenuhinya formasi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sesuai dengan struktur perangkat daerah.
- Minimnya alokasi dana yang diperuntukkan untuk program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan alokasi dana diperuntukkan untuk pos-pos tim.

b. Isu-Isu strategis Perangkat Daerah

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Pontianak dapat dikemukakan beberapa Isu-Isu strategis terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
2. Peningkatan penyediaan data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang akurat dan mutakhir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak guna keperluan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
4. Mengoptimalkan pengimplementasian regulasi sistem perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
7. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang profesional.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) Tahun 2024 yang disusun memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 yang merupakan penyalarsan program secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-KESBANGPOL) oleh karena itu perlu dilakukan review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 tersebut. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara hasil analisis kebutuhan terhadap Program dan Kegiatan beserta Rencana Kebutuhan Dana yang termuat dalam dokumen Renja-KESBANGPOL yang disusun dari tahap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir dan apabila ada koreksi atau terdapat perbedaan dalam hasil review pada setiap tahap penyusunannya dapat diperbaiki atau disempurnakan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pontianak Tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Wawasan dalam Kehidupan Kebangsaan dan Bernegara	80 %	248,468,500	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Wawasan dalam Kehidupan Kebangsaan dan Bernegara	80%	248,468,500	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	248,468,500	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 Kegiatan	248,468,500	
	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Pontianak, Semua	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan	360 Peserta	248,468,500	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Kota Pontianak, Semua	Jumlah Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan	60 Peserta	248,468,500	

	Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kecamatan , semua Kelurahan	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kecamatan , semua Kelurahan	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persetase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80 %	3,776,476,800	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Persetase Jumlah Pemahaman Tentang Pendidikan Politik	80 %	3,360,823,000	
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	5 Kegiatan	3,776,476,800	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	2 Kegiatan	3,360,823,000	

	kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah			pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di	225 Peserta	3,776,476,800	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Peserta Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di	60 Peserta 12 Parpol	3,360,823,000	

			daerah					daerah			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persetanse Jumlah Ormas	80 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persetanse Jumlah Ormas	80 %		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	1 Dokumen		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pendataan Ormas	1 Dokumen		
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Kota serta Pembentukan	80 %		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Pemerintah Kota serta Pembentukan	80 %		

			Kader P4GN					Kader P4GN			
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	3 Kegiatan		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya	1 Kegiatan		
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba	3 Kegiatan		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Sosialisasi dan Dialog FKUB, Pembentukan Satgas/Relawan Anti Narkoba	1 Kegiatan		
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan	100 %		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase Jumlah Pembentukan Kelompok Keagamaan	100 %		

	KONFLIK SOSIAL					KONFLIK SOSIAL					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	2 Kegiatan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	2 Kegiatan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi (Forkopimda dan FKDM)	12 Kali		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Rapat Koordinasi (Forkopimda dan FKDM)	12 Kali		
	Pelaksanaan	Kota	Jumlah Rapat	12 Kali		Pelaksanaan	Kota	Jumlah Rapat	12 Kali		

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	(Kominda)			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah	Pontianak, Semua Kecamatan , semua Kelurahan	(Kominda)			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan Forum OPD. Usulan program dan kegiatan dapat di jelaskan pada Tabel 2.4.

2. Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Persentase tingkat pemahaman terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 %	Kegiatan Pembinaan P4GN di setiap Kecamatan di Kota Pontianak
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat.

Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut yaitu :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (1 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (1 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (1 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar

suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa, yaitu :
 - a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2020 - 2024 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk TUJUAN sebagai berikut :

2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke			
					2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase penyelesaian konflik	$\% = (\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan} / \text{Jumlah Konflik}) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Perencanaan program dalam dokumen Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program* dengan mengaju Penyelarasan Program berdasarkan Peraturan Permendagri No 90 Tahun 2019. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi.

Dalam Rencana Kerja (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini memuat 5 (lima) Program dan 5 kegiatan Berdasarkan penyelarasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan KESBANGPOL Kota Pontianak.

Seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra-PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target			
				<p>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	90 %	12 Orang	90 %	3.314.590.000,00	<p>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	12 Orang	3.314.590.000,00
9	01	03	2.01	04	<p>Peaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>											
				<p>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	90 %	500 Orang	90 %	25.100.000.000,00	<p>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil</p>		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	500 Orang	0,00
9	01	03	2.01	05	<p>Peaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Dufput Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Talok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	90 %	119.499.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	330.000.000,00		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						420.000.000,00				455.000.000,00			
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						420.000.000,00				455.000.000,00		
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Orang	85 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	430.000.000,00
9	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur		Target	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Laporan	85 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	55.000.000,00		
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						100.000.000,00				160.000.000,00		
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						100.000.000,00				160.000.000,00	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tingkat pemahaman terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	500 Orang	90 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	150.000.000,00		
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						728.000.000,00				800.000.000,00		
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						728.000.000,00				800.000.000,00	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbalasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Talok Ukur	Target				
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	220 Orang	100 %	547.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	220 Orang	620.000.000,00	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	181.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	200.000.000,00
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA								3.290.027.000,00			4.126.800.000,00			
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00			30.000.000,00		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Meju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tokol Ukur	Target	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan/penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	20.000.000,00
8	01 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan/penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000,00
8	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.376.527.000,00				2.900.000.000,00	
9	01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2.930.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.930.000.000,00
9	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	400.000.000,00
8	01 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah												
9	01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya administrasi kepegawalan perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit	45.000.000,00
8	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
8	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
8	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Meju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
9	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	
9	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	60.000.000,00	
9	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.500.000,00	
9	01	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	150.000.000,00	
9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						460.000.000,00				550.000.000,00
9	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kekearifan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase terlaksananya pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000,00	
9	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000,00				280.000.000,00	
8	01	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Peralat dan Perengkapan Kantor									
	Penyedia Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50.000.000,00
9	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	200.000.000,00
8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.000.000,00				25.000.000,00	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	10.000.000,00
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15.000.000,00
									TOTAL	33.991.118.000,00				10.278.090.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu antara lain :

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Mempedomani RPD Kota Pontianak Tahun 2024 serta Review Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026.
3. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan perubahan rencana kerja, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 mencakup rencana kerja 6 Program 12 Kegiatan 27 Sub-Kegiatan.

Terkait pendanaan, BAKESBANGPOL Kota Pontianak melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil. Terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total pagu anggaran BAKESBANGPOL Kota Pontianak untuk tahun 2024 setelah terjadi adalah sebesar Rp. 33.991.116.000,. Adapun rincian rumusan program dan kegiatan pada Renja Bakesbangpol Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kabirutan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								33.991.116.000,00			10.276.090.000,00				
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								33.991.116.000,00			10.276.090.000,00				
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								33.991.116.000,00			10.276.090.000,00				
8	01	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							919.000.000,00			1.130.000.000,00				
8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						919.000.000,00			1.130.000.000,00				
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman nilai Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	32 Orang	90 %	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32 Orang	850.000.000,00
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan												
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman nilai Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	700 Orang	90 %	319.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	480.000.000,00
8	01	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								28.534.089.000,00			3.514.590.000,00			
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik							28.534.089.000,00			3.514.590.000,00			
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2.01.03.2.01.04	<p>Peaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	80 %	12 Orang	90 %	3.314.590.000,00	Dana Transfer Umum Dana Bag. Hasil		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	12 Orang	3.314.590.000,00	
3	01	03	2.01	04	<p>Peaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>										
2.01.03.2.01.05	<p>Peaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase Peningkatan Pemahaman Politik</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	80 %	500 Orang	90 %	25.100.000.000,00	Dana Transfer Umum Dana Bag. Hasil		<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	500 Orang	0,00	
3	01	03	2.01	05	<p>Peaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Penguatan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Pemahaman Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Laporan	90 %	119.400.000,00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	300.000.000,00		
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					420.000.000,00						455.000.000,00		
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					420.000.000,00					455.000.000,00		
9	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
					Persentase Pemberdayaan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	25 Orang	85 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	400.000.000,00
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Laporan	85 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	55.000.000,00	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						100.000.000,00					150.000.000,00	
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						100.000.000,00					150.000.000,00
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase tingkat pemahaman terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	500 Orang	80 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	150.000.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						728.000.000,00					800.000.000,00	
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						728.000.000,00					800.000.000,00
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dalam Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Pengembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya PPorumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	220 Orang	100 %	647.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	220 Orang	600.000.000,00	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase terlaksananya PPorumusan Kebijakan Teknik dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	191.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						3.290.027.000,00				4.126.600.000,00		
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00				30.000.000,00	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bag-Hasil		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	20.000.000,00
3	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen/laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bag-Hasil		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	10.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.378.527.000,00					2.900.000.000,00
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2.078.527.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi-Hasil		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.500.000.000,00
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi-Hasil		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	400.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00					45.000.000,00
3	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah/ Pegawai									
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	32 Unit	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi-Hasil		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit	45.000.000,00
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.600.000,00					326.600.000,00
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi-Hasil		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
9	01	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Peningkatan Kantor									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	
3	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Abkasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	
3	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.500.000,00	
3	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Laporan	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	150.000.000,00	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
									460.000.000,00				560.000.000,00	
3	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450.000.000,00	
3	01	01	2.07	10	Pengadaan Sersua dan Pesebaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00
8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.000.000,00				250.000.000,00	
3	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor									
	Penyedia Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	50.000.000,00
3	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	200.000.000,00
8	01	01	2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.000.000,00				25.000.000,00	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	10.000.000,00
3	01	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15.000.000,00
									TOTAL	33.991.116.000,00				10.276.090.000,00

